

6. Rekomendasi Potensi Pengembangan Industri Mineral yang Terintegrasi dengan PLTA di Papua

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya mineral dan sumber daya energi untuk pelaksanaan pengolahan dan pemurnian mineral di Papua perlu

Tim : Suganal, Siti Rochani, Ridwan Saleh, Nugroho Wahyu Wibowo

Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral

Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara

Email : suganal@tekmira.esdm.go.id

dilakukan kegiatan kajian potensi pengembangan industri mineral yang terintegrasi dengan PLTA di Papua. Hasil kegiatan tersebut bermuara pada rekomendasi rencana pengembangan industri mineral yang terintegrasi dengan PLTA, termasuk gas alam dan

batubara di Papua.

Kegiatan kajian dilaksanakan dengan penelusuran data secara langsung pada instansi pemerintah, industri pengolahan dan pemurnian mineral yang telah beroperasi komersial serta diskusi dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) pada topik yang relevan.

Dari kajian tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Dalam merencanakan pembangunan untuk wilayah Papua, pertimbangan masalah sosial dan budaya menjadi hal yang utama khususnya pemahaman serta informasi tentang budaya masyarakat antara lain konsep ulayat untuk lahan mereka, sistem kepemimpinan, sistem mata pencaharian sehingga dapat mempersiapkan dampak yang akan terjadi.
- b. Untuk meminimalisasi permasalahan tanah ulayat khususnya yang terkena dampak pembangunan hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan budaya dengan pimpinan adat setempat, kemudian Pemerintah Daerah melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik lahan.
- c. Kondisi sosial budaya di Papua saat ini masih dalam tahap persiapan peningkatan kapasitas manusia sehingga untuk pengembangan industri harusnya terlebih dahulu mempersiapkan manusia dari sisi pendidikan dan keterampilan supaya ke depan penduduk asli Papua siap bersaing dengan pendatang.



- d. Potensi energi air yang terdapat di DAS Mamberamo serta ketersediaan infrastruktur kedepan perlu dijadikan alternatif untuk mendirikan *smelter* di wilayah pantai utara Papua dengan jenis *smelter* aluminium dengan pasokan bahan baku berupa alumina dari luar Papua, antara memanfaatkan produk alumina dari Kalimantan Barat.
- e. Pembangunan *smelter* nikel dan besi perlu mempertimbangkan pasokan bahan baku dari Papua sendiri mengingat pertimbangan kompetisi di antara berbagai daerah dalam prioritas penggunaannya.
- f. Dengan melihat lokasi potensi *hydro power* dari Urumuka dan gas alam dari Bintuni (Provinsi Papua Barat), serta lokasi ketersediaan mineral tembaga, maka lokasi yang cocok untuk *smelter* mineral tersebut adalah pantai selatan (Kab. Mimika) yang dapat direalisasikan dalam waktu yang lebih dekat sebagai prioritas pertama.
- g. Di samping itu, dalam memanfaatkan *by product* berupa terak dan asam sulfat dari proses *smelting* konsentrat tembaga ditambah dengan memanfaatkan tras dan batu kapur yang juga tersedia di Papua, dimungkinkan juga di lokasi ini dibangun industri semen yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur dan konstruksi, serta industri pupuk ZA dengan bahan baku ammonia yang berasal dari pabrik ammonia yang telah direncanakan dibangun di Bintuni (memanfaatkan gas alam dari Tangguh);
- h. Untuk mempercepat terealisasinya pendirian *smelter* mineral beberapa infrastruktur perlu dibangun dan disiapkan secepatnya di wilayah pantai utara yang perlu dipercepat adalah percepatan pembangunan pelabuhan Depapre, jalur kereta api dari Jayapura ke Sarmi dan jaringan transmisi dari Mamberamo ke Sarmi, sedangkan infrastruktur yang perlu dibangun dan disiapkan untuk mendirikan *smelter* tembaga di wilayah pantai selatan (Kabupaten Mimika) adalah percepatan pembangunan jalan raya dari Nabire ke Timika;
- i. Sebagai upaya percepatan realisasi pendirian *smelter* tersebut diperlukan terobosan kebijakan tingkat provinsi berupa regulasi khusus dalam pelaksanaan pembangunan *smelter* dan industri turunan lainnya secara terpadu yang *link and match* antara industri hulu dengan industri hilir yang berpihak kepada kepentingan rakyat di Papua, terutama dalam hal *local content* dan sumber daya manusia setempat;
- j. Sejalan dengan Keppres No. 16/2015 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua, dalam konteks ini pemerintah pusat perlu mengambil langkah nyata untuk mengambil alih pembangunan PLTA dengan penyertaan modal negara (PMN) melalui BUMD yang dikoordinasikan oleh PLN;

- k. Perlu segera dibuat kebijakan/regulasi khusus untuk mempercepat pembangunan industri dan pengolahan dan pemurnian mineral sesuai dengan jiwa Keppres Nomor 16 Tahun 2015;
- l. Sebagai tindak lanjut dari kajian pembangunan industri, pengolahan mineral yang berbasis ketersediaan energi di Provinsi Papua perlu segera diikuti dengan penyusunan "*road map*" pengembangan kawasan Papua dengan mensinergikan rencana yang disusun oleh Bappenas, kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang ESDM melalui Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara.



Gambar 96. Keadaan Rencana Lokasi Pelabuhan Depapre

